

Skripsi

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS
HARGA GARAM DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO**



Diusulkan Oleh:

RAHMAWATI SETI AKBARI JUNAEDI

Nomor Stambuk : 1056 1047 7313

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS
HARGA GARAM DI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN
JENEPONTO**



Kepada

25/05/2021

1 ep
Sub-Alumni

R/0092/ADN/2100

JUN

P¹

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Rahmawati Seti Akbari Junaedi

Nomor Induk Mahasiswa : 1056 1047 7313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I  **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

Pembimbing II  **Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si**

Mengetahui:

Dekan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Ketua Program Studi


Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0160/FSP/A.4-II/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari tahun 2021

Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)

()

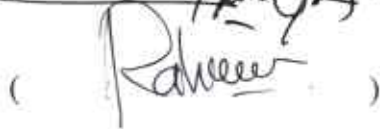
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

()

3. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si.

()

4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si.

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahmawati Seti Akbari Junaedi


Nomor Induk : 1056 1047 7313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Februari 2021

Yang Menyatakan


Rahmawati Seti Akbari Junaedi

ABSTRAK

Rahmawati Seti Akbari Junaedi, 20.21. Ihyani Malik, Hafiz Elfiansyah Parawu. peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga garam di dinas kelautan dan perikanan kecamatan bangkala kabupaten jeneponto

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. peran merupakan suatu sikap atau sebuah perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sebuah kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki sebuah status atau kedudukan tertentu. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 07 orang. Jenis penelitian ini menggunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi yaitu menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal hal ini dilihat dari aspek konsep peranan. hal ini dilihat dari indikator (1) Regulator (2) Dinamisator, Dalam hal pengelolaan garam yang baik pemerintah Kabupaten Jeneponto mengadakan bimbingan kepada para petani dengan menggunakan metode Bio Membran yang dimana teknologi ini menggunakan plastik hitam dan (3) Fasilitator. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan ini adalah Strategi dan Loyalitas penyedia sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah penyimpangan dan penundaan.

Kata Kunci : Peran, Regulator, Dinamisator, Fasilitator

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang"

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto"**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku pembimbing satu (1) saya dan Bapak **Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si** selaku pembimbing dua (2) saya, yang telah memberi saran-saran terhadap pembuatan skripsi saya hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Terimah kasih kepada ibu tercinta dan ayah tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Buat teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 013, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, 21 Februari 2021



Penulis,

Rahmawati Seti Akbari Junaidi

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep Peran.....	11
C. Konsep Peran Pemerintah.....	19
D. Kerangka Fikir.....	31
E. Fokus Penelitian.....	32
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitaian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengabsahan Data.....	38
BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Keadaan Penduduk.....	42
C. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan.....	45
D. Bentuk Peran Pemerintah.....	50

E. Pembahasan Penelitian..... 62

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 65
B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PENELITIAN

RIWAYAT HIDUP



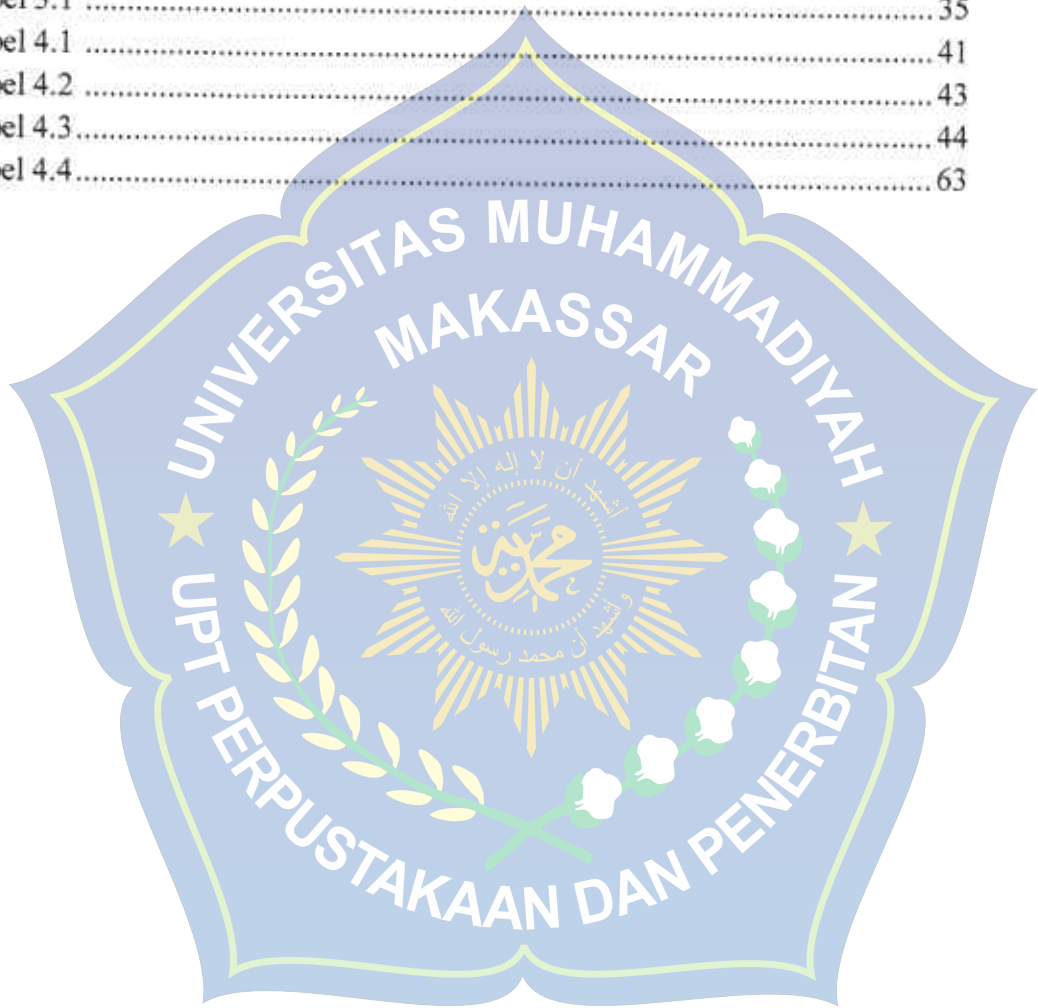
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	32
Gambar 4.1	50



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	35
Tabel 4.1	41
Tabel 4.2	43
Tabel 4.3	44
Tabel 4.4	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersamaan dengan bertumbuhnya suatu *mobilitas capital* dari suatu negara merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri dari liberalisasi perdagangan dalam satu sisi juga telah melahirkan beberapa ketimpangan dalam hal ekonomi negara. Disisi lain yang mengangkat konsep peran dari suatu negara di bidang ekonomi dengan basis universal seperti adanya keadilan dalam hal perekonomian yang dari adanya redistribusi pendapatan baik melalui zakat maupun jaminan sosial dan larangan riba.

Lemah-kuatnya peran pemerintahan tergantung pada komitmennya dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa ada keadilan loyalitas masyarakat tidak akan ada, bila tidak ada loyalitas maka tidak akan ada lingkungan yang mendukung implementasi hukum dan perundang-undangan, pembangunan dan kemakmuran. Ketiadaan itu akan menyebabkan administrasi politik dan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif, yang bila dibiarkan akan menuju kehancuran.

Tidak hanya petani garam yang menjadi faktor penentu laju perekonomian dan inflasi di daerah tersebut, melainkan peran pemerintah juga turut mempengaruhi laju inflasi dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di daerah tersebut sehingga dapat menjadikan laju inflasi terhambat. Melihat lambatnya laju inflasi, maka harga-harga barang komoditas seperti sembako dll tidak akan mengalami kenaikan harga secara signifikan. Adanya kenaikan harga pada bahan pokok maka dapat menyebabkan

kenaikan tingkat kemiskinan masyarakat. Sehingga pemerintah memerlukan kebijakan untuk menanggulangnya.

Tidak hanya menjaga stabilisasi harga, juga bertujuan untuk menjaga pasokan barang komoditas di setiap pasar apabila terjadi pergerakan harga yang terjadi baik seperti adanya inflasi atau memasukan hari-hari besar di Indonesia yang mengakibatkan harga di setiap pasar melonjak dengan cepat. Selain itu, juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang berkehidupan dibawah standar kelayakan, karena hal tersebut menjual barang komoditas yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harga barang tersebut dibawah harga pasar yang ada.

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015, Jeneponto menduduki peringkat 14 sebagai daerah produsen garam terbesar di Indonesia. Pembuatan garam di Kabupaten Jeneponto terpusat pada empat kecamatan yaitu, Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Arungkeke dan Tamalatea. Namun sangat disayangkan karena produksi garam Kabupaten Jeneponto kian merosot tiap tahunnya. Menurut data BPS, produksi garam Jeneponto pada tahun 2014 hingga 2018 berturut turut adalah 72.864,42 Ton, 51.237,9 Ton, 21.316 Ton, 19.731,82 Ton, 38.769,55 Ton. Terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi yang sangat tajam yaitu sebesar 46,8% jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Penurunan produksi garam ini diindikasikan karena penurunan harga jual garam. Terbukti, akhir-akhir ini, para petani tambak garam mengeluhkan harga garam yang turun drastis. Beberapa petani mengaku bahwa harga garam saat ini

hanya dihargai sebesar Rp25.000,00 hingga Rp50.000,00 per karung isi 80 liter, yang biasanya bisa mencapai Rp80.000,00 hingga Rp150.000,00 per karung. Rendahnya harga garam, tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan hidup para petani garam

Merosotnya harga garam tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang masih merealisasikan impor garam industri. Pada semester II tahun 2019 ini, pemerintah telah memastikan adanya Persetujuan Impor (PI) untuk garam industri. Rekomendasi impor yang disetujui mencapai 2,7 juta ton hingga akhir 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang volume impor garam industri menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi kenaikan impor garam industri tertinggi yaitu sebesar 2,8 juta ton, dengan kenaikan sebesar 11,2% dari tahun 2017 yaitu sebesar 2,6 juta ton. Jika kebijakan impor tersebut terus berlanjut, maka keberadaan garam lokal akan diabaikan dan mempengaruhi stabilitas harga garam lokal.

Selain itu, merosotnya harga garam di Jeneponto juga disebabkan karena proses produksi garam masih menggunakan cara tradisional yang hanya mengandalkan penguapan air laut dengan bantuan cahaya matahari tanpa didukung oleh penggunaan teknologi yang mutakhir. Proses produksi yang masih tradisional tersebut menyebabkan rendahnya kualitas garam sehingga berakibat pula pada rendahnya harga garam.

Dengan kualitas yang rendah, garam Jeneponto belum mampu mencapai faktor kualitas garam yang telah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan

industri di Indonesia. Oleh karena itu, produksi garam di Indonesia, khususnya di Jeneponto masih terabaikan dan dikalahkan oleh kualitas garam impor.

Melihat masalah merosotnya harga garam di Jeneponto yang sangat berdampak pada kesejahteraan hidup para petani garam, maka pemerintah daerah seharusnya segera mengatasi masalah ini dengan cara menstabilkan harga garam. Selain itu pemerintah daerah juga perlu memberi perhatian khusus pada peningkatan kualitas garam yang dihasilkan masyarakat Jeneponto. Tahun lalu, pada Oktober 2018, Deputy Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Eniya Listiani Dewi mengunjungi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang disambut oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman. Pada kunjungan tersebut, BPPT menyampaikan bahwa lembaganya tertarik pada pengembangan garam yang ada di wilayah Jeneponto. Eniya menargetkan Jeneponto akan menjadi pusat pengelolaan garam nasional karena memiliki potensi garam terbesar di wilayah timur Indonesia.

Mengembangkan produksi garam yang ada di Jeneponto menuju industri garam nasional, maka harus dilakukan revolusi lahan dengan mengintegrasikan lahan garam dan mengalirkan dengan metode gravitasi. Kemudian, masuk di kolam reservoir yang bertingkat, air terkumpul, baru setelah itu masuk ke lahan kristalisasi milik petani. Metode tersebut merupakan terobosan baru yang diyakini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam. Petani garam tidak lagi mengandalkan faktor alam yang mengganggu masa panen dan menurunkan kualitas garam.

Rencana pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya agar produksi garam rakyat di Jeneponto dilirik dan dihargai sesuai dengan harga pasar nasional. Diharapkan, pemerintah segera merealisasikan rencana tersebut agar harga garam di Jeneponto bisa stabil dan mengurangi volume impor garam dari luar negeri sehingga produksi garam Jeneponto bisa meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. <https://makassar.terkini.id/produksi-garam-jeneponto-semakin-merosot/>

Maka dari itu pemerintah Kabupaten Jeneponto mengambil langkah secepatnya dalam hal menjaga stabilitas harga garam yang ada di Kecamatan Bangkala. Hal ini dikarenakan pasokan garam dari Jeneponto ke Makassar tidak stabil sehingga mempengaruhi harga garam yang ada dipasaran. Pada saat itu harga garam lokal masih stabil. Sementara saat ini, jika pemerintah menambah impor kembali dengan harga lokal yang murah, sama saja dengan mematikan garam rakyat. Pada saat ini harga garam lokal masih stabil. Sementara saat ini, jika pemerintah menambah impor kembali dengan harga lokal yang murah, sama saja dengan mematikan garam rakyat. Dari permasalahan inilah, peneliti mengangkat judul "*Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ?

2. Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ?
3. Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
2. Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
3. Mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis; hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dan dijadikan bahan kajian dalam rangka pengembangan ilmu administrasi.
2. Secara praktis; hasil penelitian ini dapat di harapkan memberikan masukan terhadap Pemerintah dalam upaya pemerintah daerah dalam menjaga

stabilitas harga garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

3. Secara metodologis; hasil dari penelitian ini diharapkan pula menjadi kajian dalam hal pengembangan riset dan mereka yang akan melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul proposal saya adalah sebagai berikut :

1. Armaya Halidasari (2018) dengan judul : Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Produksi Garam di Gampong Cebrek, Kabupaten Pidie. Produksi merupakan pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Produksi merupakan faktor utama kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Pidie, terdapat usaha produksi garam yang terletak di gampong Cebrek, dalam menjalankan usaha tersebut tidak terlepas dari masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kendala apa yang di hadapi petani garam dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam. Peran yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek harus segera ditangani oleh dinas terkait demi kelancaran produksi dan menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Adapun pemerintah yang terkait dalam usaha produksi garam ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini dinas kelautan dan perikanan belum

sepenuhnya menjalankan kewajiban yang harus dilakukan terhadap peningkatan produksi garam di Gampong Cebrek. Dalam perspektif, pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyat termasuk dalam aktivitas ekonomi, harus dapat memegang kokoh pada landasan dalam menjalankan kewenangannya berlaku adil agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

2. Nailul Huda (2018) Dengan Judul: Analisis Industri Garam Lokal di Kabupaten Rembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur pasar petani garam dan pedagang pengepul garam, menganalisis peran petani garam dan pengepul garam dalam pasar, menganalisis integrasi vertikal pedagang pengepul ke petani, dan menganalisis pengaruh *market share*, produktivitas, dan *capital to labor ratio* (CLR) terhadap *margin share* petani. Analisis ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *structure-conduct-performance* (SCP). Penelitian ini menggunakan model regresi sederhana (OLS) untuk menganalisis pengaruh antar variabel.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan struktur pasar persaingan tingkat petani adalah pasar persaingan monopolistik dan struktur pasar persaingan tingkat pedagang adalah oligopsoni. Pedagang pengepul lebih mempunyai peran dalam menentukan harga yang disepakati karena mempunyai posisi tawar yang lebih baik daripada petani. Derajat integrasi vertikal dari pedagang pengepul ke petani adalah 1,05, yang artinya petani tidak

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

3. Mohammad Syakir Imdad (2019) Dengan Judul : Pengaruh Produktivitas dan Harga Jual Produksi Garam Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal, produktivitas dan harga jual produksi garam terhadap pendapatan masyarakat di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
4. Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh (2018) Dengan Judul : Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Studi kasus di dinas perindag DIY. Peran pemerintah dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan. Stabilisasi merupakan tindakan untuk mempertahankan suatu harga barang maupun jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak sekali program yang dilaksanakan pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga demi mencukupi kebutuhan masyarakat khususnya yang hidup dibawah standar kemiskinan salah satunya dengan cara mengadakan Operasi Pasar Murni (OPM). Operasi Pasar merupakan suatu kegiatan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara injeksi, untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran dengan cara penetapan harga dengan harga dibawah harga

pasarnya. Penelitian kualitatif digunakan sebagai desain utama penelitian ini untuk mendapatkan gambaran program kerja Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilaksanakan pemerintah serta didukung dengan penelitian kuantitatif yang digunakan sebagai desain pendukung dengan cara pengambilan sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan metode *purposive sample* yaitu masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui manfaat dari adanya program Operasi Pasar Murni (OPM) tersebut. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa program Operasi Pasar Murni (OPM) yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dari ekonomi islam yaitu kemaslahatan umat.

B. Konsep Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (Peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. McEachern (2010) mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif

Sedangkan menurut Poerwodarminta (2010) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan

perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut **Veithzal Rivai (2011)** peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. **Miftha Thoha (2009)** peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Menurut **Dewi Wulan sari,(2009)** " Peran merupakan konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah individu dalam masyarakat dan meliputi pula tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi sebuah struktur social dalam masyarakat". **Maurice Duverger (2010)** yang mempunyai bahwa istilah "peran" (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktoraktor profesional.

Menurut **J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2013)** peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Glen Elder (dalam Sarwono, 2010) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan "*life-course*" yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Menurut Paul B. Horton dan Chesner L. Hunt (2010) yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan. Menurut Komaruddin, (1994) yang dimaksudkan dengan peran adalah: Bagian dari tugas mama yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Pola penilaian yang diharapkan dapat mengenai suatu status. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

Menurut Biddle dalam Suhardono (2009), berpendapat bahwa "konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial" Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Arimbi dan Santosa, 2009).

Apabila seseorang dapat melaksanakan suatu hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, dia sudah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan mempunyai perbedaan hanya untuk kepentingan sebuah ilmu pengetahuan tersebut. Kedua hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena saling

tergantung pada uang lain begitu pula sebaliknya. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut Levinson dalam Soekanto (2009) :

- a. Peran dapat pula meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini yaitu merupakan rangkaian sebuah peraturan yang dapat membimbing seseorang dalam hal kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan sebuah konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh sebuah individu dalam masyarakat sebagai organisasi .
- c. Peranan dapat pula dikatakan sebagai sebuah perilaku individu tertentu yang sangat penting terhadap struktur sosial dalam masyarakat. Sejumlah peran sering disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang berdasarkan peran yang di miliki oleh seseorang karena telah menduduki sebuah status-status social khusus. Mereka dapat mendefinisikan bahwa peran yaitu "melibatkan sebuah pola pendiptaan produk sebagai lawan dari sebuah perilaku atau sebuah tindakan".

Dari beberapa pengertian di atas yang menurut para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau sebuah perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sebuah kelompok orang terhadap seseorang yang memiliki sebuah status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dekranasda, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas yang terkait.

Dapat pula disimpulkan bahwa suatu peran merupakan sebuah tindakan atau aktivitas yang di harapkan oleh sebuah masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada tiga uraian tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2009). Peran pemerintah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Jenis-Jenis Peran.

1. Peran Aktif Peran aktif merupakan sebuah peran yang dilakukan sebuah orang secara obsolut atau selalu aktif dalam sebuah tindakannya yang

mereka lakukan di dalam organisasi atau sebuah lembaga social yang mereka miliki. Keaktifan ini sendiri dapat di ukur dengan melalui bentuk kehadiran.

2. Peran Partisipasif definisi peran partisipatif yaitu sebuah peran yang dilakukan yang hanya berdasar pada jangka waktu tertentu. Definisi ini sangat berlawanan sekali dengan peran aktif, karena biasanya kondisi peran partisipatif dapat dilakukan dengan wacana objek bukan sebuah subjek.
3. Peran Pasif definisi peran pasif yaitu peran yang tidak dilakukan dan mengindikasikan bahwa peran pasif yaitu peran yang digunakan sebagai sebuah simbol terhadap keadaan tertentu yang ada didalam suatu kehidupan masyarakat. Jenis atau pengelompokan peran yang sudah dikemukakan dan sudah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dalam Buku "Sosiologi Sebagai Pengantar", yang mengklarifikasikan peran dengan sangat jelas berdasarkan pada kriteria tertentu.

Adapun beberapa pengelompokan peran yang di kemukakan oleh Henry Mintzberg 2010:

a. Peran Antarpersonal

Merupakan peran hubungan personal dapat mewakili organisasi untuk kegiatan-kegiatan diluar organisasi. Pemimpin (*leader*), Manajer mengkoordinasi, memotivasi, dan mendukung bawahannya. Penghubung (*liaison*). Manajer menghubungkan personal-personal di semua tingkatan manajemen. Semua manajer harus memiliki peran kepemimpinan.

Suatu peran ini dapat mencakup pemberian motivasi, pelatihan, perekrutan, serta mencakup pendisiplinan karyawan.

b. Peran Informasional

Semua manajer, sampai pada tingkat tertentu, dapat mengumpulkan suatu informasi dari organisasi dan institusi luar. Biasanya, mereka memperoleh informasi dari majalah serta melakukan komunikasi dengan individu lain dan mempelajari perubahan-perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin bisa di rencanakan oleh para pesaing dan semacamnya. Mintzberg mengatakan hal ini disebut sebagai peran pemantau. Semua manajer juga selalu bertindak sebagai penyalur untuk meneruskan informasi kepada anggota organisasi. Hal ini sering disebut sebagai peran penyebar. Selain itu manajer juga bertindak selaku juru bicara ketika mewakili organisasinya di hadapan pihak luar.

c. Peran pengambilan Keputusan.

Dalam hal ini Mintzberg mengidentifikasi empat peran yang terkait dengan pengambilan keputusan. Dalam peran kewirausahaan, semua manajer memulai dan melakukan pengawasan terhadap proyek baru yang akan meningkatkan kualitas kerja organisasi mereka. Sebagai penyelesaian masalah, manajer melakukan sebuah tindakan korektif untuk penyelesaian berbagai masalah yang tidak diduga. Sebagai pengalokasian sumber daya. Manajer juga bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Terakhir, manajer memainkan peran negosiator, dimana mereka mendiskusikan berbagai persoalan dan tawar-menawar dengan unit-

unit lain demi keuntungan unit mereka sendiri

C. Konsep Peran Pemerintah

Peranan pemerintah menurut **Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 2010)** dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.
3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "development agent" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Tjokroamidjojo (2010) Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:

1. Operasi langsung (operation: pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.

2. Pengendalian langsung (direct control): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “action ladern” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action ladern.
3. Pengendalian tak langsung (indirect control): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pemengaruhan langsung (direct influence): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.
5. Pemengaruhan tak langsung (indirect influence): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (promoting a receptive attitude toward innovation).

Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh **Sondang P. Siagian (2010)** dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. **Nyoman**

Sumaryadi (2010) Peran pemerintah penting dalam hal menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial

Selanjutnya berdasarkan pendapat **Sitanggang (2009)** Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan.

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, hal ini sejalan dengan **Talidzu Ndraha (2011)** peran pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

1. Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
2. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
3. Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya.
4. Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.

5. Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
6. Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, dan pihak swasta dengan individu. Untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Pengertian pemerintah memiliki banyak arti. Sebagian ahli memberikan pengertian pemerintah dalam arti luas, yaitu pemerintah berdasarkan apa tugas yang dilaksanakannya. Menurut Inu Kencana Syafie, di dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* bahwa secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan "pe-" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara.
2. Mendapat akhiran "an-" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.
(Inu Kencana, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang

disebut dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan pemerintah daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pasal 20 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemeritahan berpedoman atas asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efesiensi
9. Asas efektif

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
3. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan.
4. Melestarikan sosial budaya.
5. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
6. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Privinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737), peran pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah

yang diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintah yang diluar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan.

Peranan pemerintah dewasa ini makin besar bahkan di negara-negara yang menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang besar. Peranan pemerintah pun semakin luas sebagaimana terlihat dari pemberian pelayanan umum oleh dinas-dinas pemerintah yaitu mengatur, mendorong, mengoordinir, bahkan membiayai

usaha pihak swasta maupun daerah-daerah. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Sesungguhnya peranan birokrasi pemerintah sangat luas mengingat peranan tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Terutama menyangkut aspek pelaksanaan birokrasi yang efisien, efektif, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat menumbuhkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. (Yusuf, 2014)

mengatakan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai regulator.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan

dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator.

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator.

peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi di atas, pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang dinamakan dengan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah ialah alat pemerintah untuk menjalankan semua tugas-tugas pemerintahan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dari keempat bentuk peranan pemerintah tersebut di atas dapat terlihat jelas peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan (Lingga, 2011) yang dimaksud adalah :

1. Fasilitator

- a. Menjaga kualitas dan kuantitas produk
- b. Meningkatkan daya saing produk
- c. Membantu pemasaran produk
- d. Membantu pengembangan usaha

2. Inovator

- a. Menumbuhkan ide ide baru
- b. Menumbuhkan metode- metode baru
- c. Menumbuhkan sistem-sistem baru
- d. Menumbuhkan strategi-strategi baru

3. Stabilisator

- a. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang
- b. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha
- c. Menjamin ketersediaan produk
- d. Menjamin keberlangsungan usaha

4. Koordinator

- a. Menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat
- b. Menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi
- c. Menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten
- d. Menjalin koordinasi dengan pelaku usaha

5. Motivator

- a. Memotivasi investor
- b. Memotivasi pelaku usaha

c. Memotivasi masyarakat

Untuk mengemban tugas negara menurut Ndraha (Hum 2010), pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan

Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelebagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri

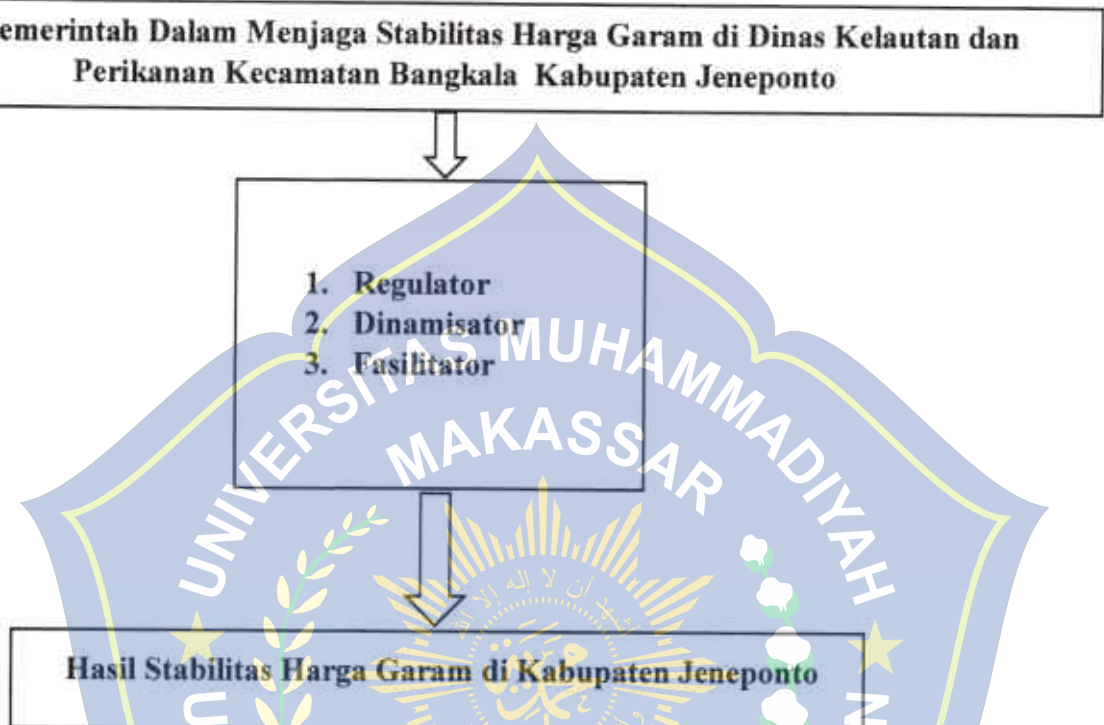
dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang menangani stabilitas harga garam yang ada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ini melakukan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang bersumber dari APBN yang merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi petani garam, serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam serta menjaga stabilitas harga garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Tim pendamping PUGAR Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Jeneponto membeberkan informasi mengenai kelompok petani garam binaanya, bahkan kelompok tani yang tidak terdaftar pun di binanya. Kelompok petani binaan kita di Jeneponto yang terdaftar di Kesabngpol itu berjumlah sekitar 8 Kelompok tani yang kita bina, tetapi kita juga tetap membina kelompok-kelompok tani yang belum terdaftar, total kelompok tani garam sekitar 30 kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Arungkeke, Tamalatea bangkala dan bangkala barat.

D. Kerangka Fikir

Peran pemerintah daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah peran yang di mainkan oleh pemerintah daerah kabupaten Jeneponto dalam menjaga stabilitas harga garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, dalam hal menjaga stabilitas harga garam di Kabupaten Jeneponto yang demikian tentunya diharapkan memberikan peran kepada individu yang dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang memegang tanggung jawab untuk itu.

Adapun indikator peran pemerintah mengenai stabilitas harga garam yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto terdiri dari Regulator (Pembuat Peraturan dan Instrumen), Dinamisator (Pengarahan, Bimbingan, dan Penggerak), dan Fasilitator (Pelatihan, Keterampilan, dan Pendanaan atau Permodalan). Indikator pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan agar terciptanya stabilitas harga garam yang ada di Jeneponto khususnya di Kecamatan Bangkala

Gambar Kerangka Fikir 2.1



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berasal dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersumber dari rumusan masalah adalah “ Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”. Dari fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu 1.Regulator 2. Dinamisator, 3. Fasilitator.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus pada penelitian Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Yaitu:

1. Regulator adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga garam yang berlaku di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Salah satu aturannya yaitu aturan tentang PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat). Dengan adanya aturan mengenai Pugar ini sangat menguntungkan para petani karena dapat meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan hasil produksi.
2. Dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas harga garam di Kabupaten Jeneponto diantaranya dengan memberikan Pengarahan, Bimbingan dan Penggerak. Ketiga aspek ini merupakan poin yang sangat berguna bagi para petani garam di Kabupaten Jeneponto demi meningkatkan hasil produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto.
3. Fasilitator adalah penyedia sumberdaya dan pelatihan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat menjaga stabilitas harga garam yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Sebagai fasilitator ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Pengembangan produksi dan pendanaan atau permodalan. Pengadaan alat produksi garam yang baik merupakan sarana yang paling menunjang guna demi meningkatkan kualitas produksi para petani garam di Kabupaten Jeneponto.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini direncanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal dan mendapat surat izin meneliti dari LP3M.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kejadian yang sebenarnya dari lokasi yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga dapat mempermudah bagi penulis memperoleh data yang objektif dalam rangka mengetahui seperti apa Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe studi kasus yaitu untuk memberikan gambaran kasus tentang bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung dilokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung secara terbuka sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melekukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara.

2. Data skunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai buku-buku yang berkaitan dengan peran pemerintah

D. Informan Penelitian

Adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Arfan Sanre	AS	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto	1
2	Hartawan	HW	Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto	1
3	Ibrahim, Abdul Rajab	IB, AJ	Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto	2
4	DG. Sitaba	DS	Petani Garam	1

5	DG. Nai	DN	Petani Garam	1
6	Abdul Rahim	AR	Petani Garam	1
Jumlah				7

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan bagi peneliti, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Adalah pengamatan data yang dilakukan melalui pengamatan penulis secara langsung di lapangan mengenai Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

2. Wawancara

Adalah dimana penulis melakukan interview atau wawancara terhadap apa yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga garam yang ada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

3. Studi kepustakaan (dokumen)

Adalah dokumen yang sangat di butuhkan dalam penelitian ini tentang permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti meliputi data, seperti buku ilmiah dan laporan BPS (Badan Pusat Statistik).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala dalam hal menjaga stabilitas harga garam. Dan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang diterapkan dalam pengembangan berbentuk teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil penemuan

baru yang sebelumnya sudah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

G. Keabsahan Data

Salah satu cara sangat penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian yaitu dengan melakukan triangulasi. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai cara pengumpulan data atau sumber data yang sudah ada. Triangulasi terbagi atas tiga yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat keabsahan terhadap informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan yang dikatakan umum dengan yang dilakukan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, memperoleh data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan atau yang lain,

untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data jugadilakukandengancara pengecekan dengan wawancara, observasi. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Penjelasan lokasi penelitian diperlukan agar dapat mengenal atau mengetahui objek terlebih dahulu sebelum melangkah ke pembahasan atau permasalahan yang di angkat atau dikaji dalam tulisan ini. Penjelasan lokasi dalam hal ini meliputi: profil singkat Kabupaten dan Kecamatan Bangkala, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta visi misi yang akan dibahas yang menjadi objek penelitian.

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung barat daya dari wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terletak di antara $50^{\circ} 23' 12''$ – $50^{\circ} 42' 35''$ LS dan antara $119^{\circ} 29' 12''$ – $119^{\circ} 56' 45''$ BT. Ditinjau dari batas-batasnya jeneponto mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Barat : Kabupaten Takalar

Secara administratif, Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang potensial untuk pengembangan rumput laut karena memiliki panjang pantai ± 95 km dengan luas 749.79 km². Dan memiliki 11 wilayah kecamatan dengan luas wilayah 74.979 ha atau $749,79$ Km². Namun untuk memudahkan, penelitian ini hanya meneliti 4 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yaitu Kecamatan Bangkala, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan

Tamalatea dan Kecamatan Binamu yang merupakan daerah penghasil rumput laut terbesar di antara kecamatan lainnya. Untuk 7 kecamatan lainnya yakni Kecamatan Batang, Kecamatan bangkala barat dan Kecamatan Tarowang tidak dijadikan lokasi penelitian. Serta Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Turatea, Kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia tidak dijadikan lokasi penelitian karena keempat wilayah kecamatan ini merupakan wilayah pegunungan/dataran tinggi.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto.

No.	Kecamatan	Luas (Km)	Pesentase Dari Luas Kabupaten (%)
1	Bangkala	121,82	16,25
2	Bangkala Barat	152,69	20,40
3	Tamalatea	57,58	7,68
4	Bontoramba	88,30	11,78
5	Binamu	69,49	9,27
6	Turatea	53,76	7,17
7	Batang	33,04	4,41
8	Arungkeke	29,91	3,99
9	Tarowang	40,68	5,43
10	Kelara	43,95	5,86
11	Rumbia	58,30	7,78
	Jeneponto	749,79	100,00

Sumber : Badan Petanahan Nasional Kabupaten Jeneponto , 2020

Secara Administrasi, wilayah Kabupaten Jeneponto beribukota di Bontosunggu Terbagi menjadi 11 kecamatan dan 31 desa/kelurahan. Kecamatan Bangkala Barat merupakan kecamatan terluas yaitu 152,69 km² atau 20,40 %, sedangkan Kecamatan Arungkeke adalah yang terkecil yakni 29,91 km² atau 3,97 % .

Penggunaan lahan di Kabupaten Jeneponto terdiri dari lahan Sawah Tadah Hujan 16.897 ha (22,53%), Tegalan 36.166 ha (48,23%), Ladang 1.158 ha (1,54%), Perkebunan 1.431 ha (1,91%), Tambak/Empang/Kolam 2.745 ha (3,67%), Hutan Rakyat 6.172 ha (8,23%), Lahan Bukan Pertanian 10.329 ha (13,77%). Sampai dengan akhir tahun 2013 wilayah Kabupaten Jeneponto tidak mengalami pemekaran, yaitu tetap terdiri atas 11 wilayah kecamatan. Selanjutnya dari kesebelas wilayah kecamatan tersebut wilayahnya dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut desa atau kelurahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan dengan rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda meskipun perbedaan itu relative kecil, sehingga pemanfaatan sumber-sumber yang ada relatif sama untuk menunjang pertumbuhan pembangunan wilayah.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dan penggerak pembangunan suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia (penduduk) yang tinggi tentunya akan menjadi salah satu modal utama suatu daerah dalam upaya pengembangan dan

pembangunan daerah. Sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas rendah dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan akan menjadi masalah dalam suatu daerah. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk dapat meningkatkan persaingan dan menjadi sumber daya yang handal dalam pembangunan daerah.

Penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 berjumlah 348.138 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Binamu yaitu sebanyak 53.252 jiwa, di susul Kecamatan Bangkala sebanyak 50.650 jiwa dan Kecamatan Tamalatea 40.991 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada kecamatan batang sebesar 19.496 jiwa dan kecamatan arungkeke yang berjumlah 18.522 jiwa.

Tabel 4.2 Penduduk Kabupaten Jeneponto Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2020

No	Kecamatan	2018 (Jiwa)	2019 (Jiwa)	2020 (Jiwa)
1	Bangkala	49.859	50.361	50.650
2	Bangkala Barat	26.340	26.605	26.758
3	Tamalatea	40.351	40.757	40.991
4	Bontoramba	34.975	35.327	35.530
5	Binamu	52.420	52.948	53.252
6	Turatea	29.919	30.220	30.394
7	Batang	19.192	19.385	19.496
8	Arungkeke	18.233	18.416	18.522

9	Tarowang	22.337	22.562	22.692
10	Kelara	26.440	26.706	26.860
11	Rumbia	22.634	22.862	22.993
Jeneponto		342.700	346.149	348.138

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, 2020

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jeneponto, jumlah penduduk Kabupaten pada Tahun 2020 adalah sebesar 348.134 jiwa, yang tersebar di 11 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yakni Kecamatan Binamu dengan penduduk 53.252 jiwa, dan terkecil di kecamatan Arungkeke Dengan penduduk 18.522 jiwa.

Dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto 4 diantaranya adalah penghasil garam yakni, Kecamatan Bangkala, bangkala Barat, Arungkeke dan Tamalatea. Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter diatas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape - Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di desa Bungeng. **Tabel 4.3**

Data luas lahan tambak di Kabupaten Jeneponto

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Pemilik (Orang)	Penyewa (Orang)	Produksi (Ton)
1	Bangkala Barat	20,41	70	80	2.073,39

2	Bangkala	429,93	1.650	1.662	20.396,65
3	Tamalatea	68,29	300	320	5.233,70
4	Arungkeke	291,37	890	910	11.065,81

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat luas lahan petambak garam yang ada di Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengungkapkan bahwa garam merupakan salah satu pelengkap kebutuhan pangan.

C. Profil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dinas Pemerintah yang ada di Kabupaten Jeneponto yang bergerak dalam hal hasil laut. Dinas Perikanan dan Kelautan terletak di Kecamatan Binamu dan terletak di jalan HV. Worang Tanrusampe.

- a. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jeneponto
 1. Tugas dinas perikanan dan kelautan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan di bidang perikanan yang menjadi wewenang daerah kabupaten jeneponto.
 2. Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan dalam melaksanakan tugas tersebut yakni :
 - a) Perumusan kebijakan dibidang perikanan dan kelautan
 - b) Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan dan kelautan
 - c) Pelaksaaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan dan kelautan
 - d) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perikanan dan kelautan

3. Kepala Dinas mempunyai fungsi tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan ditugaskan kepala pemerintah daerah.
4. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi di lingkungan dinas perikanan dan kelautan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a) Merumuskan bahan penyusun anggaran dan pertanggung jawaban keuangan.
 - b) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana
 - c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
 - d) Melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan serta melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek.
5. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
 - a) Menyusun tata naskah Dinas Perikana dan Kelautan.
 - b) Melakukan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat
 - c) Melakukan analisis kebutuhan barang – barang keperluan kantor serta pembekalan lainnya.

6. Sub bagian program mempunyai tugas :
 - a) Menyusun dan mengolah data untuk bahan penyusunan program.
 - b) Menyusun penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek serta penetapan rencana strategis pengembangan.
 - c) Melakukan monitoring , evaluasi dan penyusunan laporan.
 - d) Menyusun analisis dan pengendalian pelaksanaan program dan proyek.
7. Sub bagian keuangan mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran.
 - b) Menyusun usulan anggaran.
 - c) Menyusun dan mengelolah tata usaha keuangan dan pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
 - d) Melakukan pembayaran gaji pegawai , keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya – biaya lain sebagai pengeluaran dinas.
8. Bidang Perikanan dan Budidaya dan daya asing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perikanan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi seksi budidaya dan perikanan, seksi sarana dan prasarana.
9. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas yakni melaksanakan sebagian tugas dinas perikanan, penyiapan koordinasi,

fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir.

10. Bidang Pengawasan dan Perlindungan mempunyai tugas yakni melaksanakan sebagian tugas dinas perikanan melakukan pengawasan dalam melakukan program dan proyek dan perlindungan dalam melakukan evaluasi serta monitoring pelaporan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yakni membantu sub bagian dan bidang-bidang lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

b. Uraian Visi Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jeneponto

1. Visi

Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha dan pemberdayaan di bidang perikanan dan kelautan. Makna dari visi tersebut adalah keadaan masyarakat kabupaten jeneponto yang bekerja sebagai petambak garam di daerah pesisir yang mampu bertahan dalam berbagai perubahan dan berupaya merubah dari kegiatan yang bersifat tradisional menjadi berwawasan industry dan berjiwa bisnis dengan mengutamakan potensi yang ada di daerah. Adapun tujuan dari visi tersebut adalah:

- a) Mencerminkan keinginan yang akan dicapai.
- b) Memberikan arah fokus dan strategis yang jelas.
- c) Memberdayakan potensi yang tersedia di daerah.
- d) Pengelolaan yang produktif dan lestari.

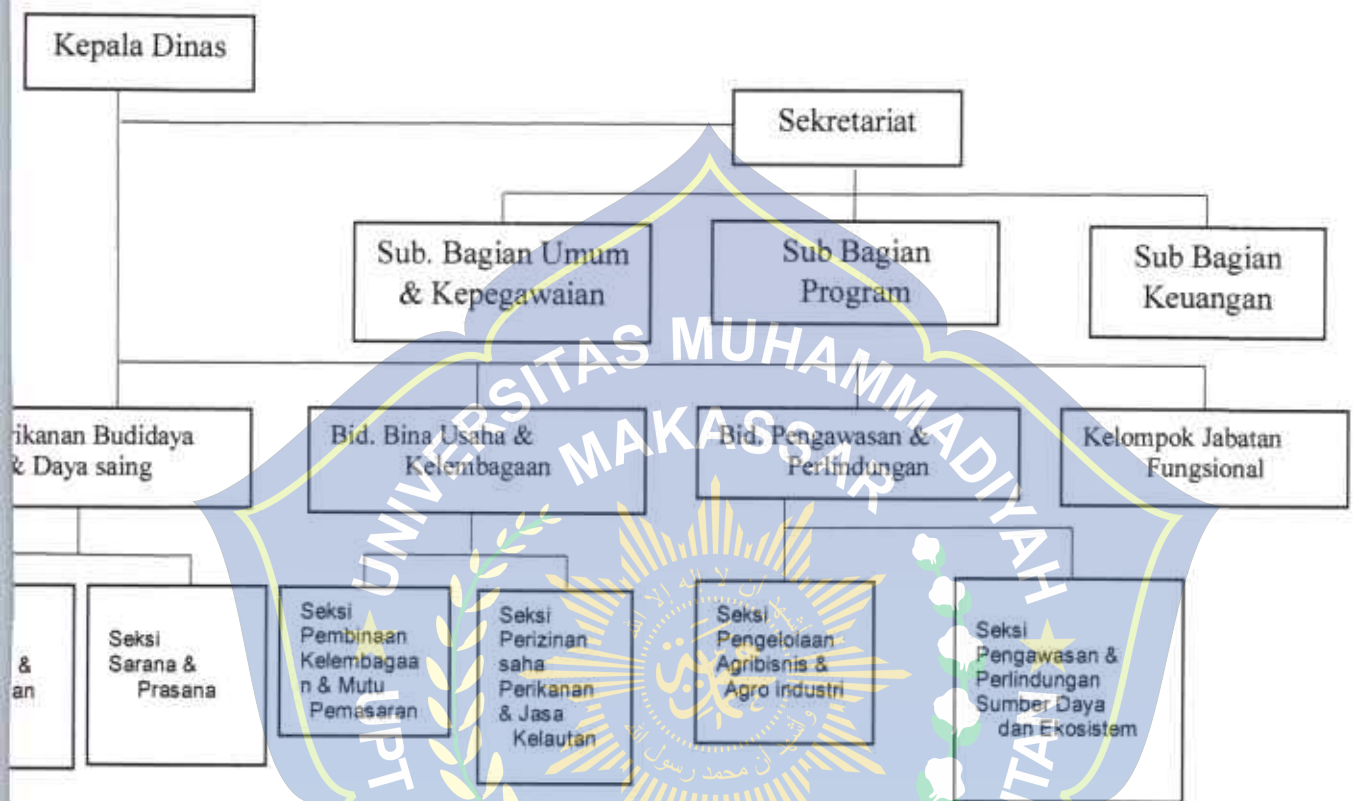
2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai usaha pelaksanaannya. Adapun misi dari dinas perikanan dan kabupaten jenepono sebagai berikut :

- a) Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab
- b) Mengembangkan sarana, prasaran teknologi dan informasi perikanan dan kelautan.
- c) Mengembangkan kemandirian kelembagaan pembudidaya yang tangguh dan berdaya asing
- d) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja.

3. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jenepono

Adapun gambaran administrasi Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Jeneponto

D. Bentuk Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Adapun beberapa bentuk peran pemerintah yang khususnya pada dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Jeneponto dalam hal menjaga stabilitas harga garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dapat dilihat berdasarkan tiga indikator yaitu : Regulator, Dinamisator, Fasilitator

1. Regulator

Regulator adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan

dengan stabilitas harga garam yang berlaku di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Regulator dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto yang mengatakan :

“Kalau masalah aturan, sudah lama diberlakukan mulai dari beberapa tahun yang lalu serta sudah ada aturan Perda yang mengatur tentang stabilitas harga garam hal ini dikarenakan garam yang ada di Kabupaten Jeneponto ini sudah termasuk kedalam stok nasional pengeksport garam wilayah selatan dan yang terbesar serta mempunyai wilayah produksi kurang lebih 800 Hektar yang tersebar di 4 Kecamatan yang ada di Jeneponto yaitu : Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, dan yang terakhir yaitu Arungkeke.”.(Hasil wawancara AS,29 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait regulator dapat disimpulkan bahwa aturan ini sudah lama berlaku dari beberapa tahun lalu hal ini dikarenakan Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten pengeksport garam terbesar di wilayah selatan yang mempunyai luas lahan yaitu 800 Hektar yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa :

“Menjaga kualitas harga garam dan tidak mungkin juga pengepul garam yang ada di Kabupaten Jeneponto mengambil garam dari luar karena kita punya stok disini sangat melimpah , malahan garam dari Kabupaten Jeneponto ini kita sudah ekspor ke Kabupaten lain yang ada di Sulawesi atau kita ekspor juga keprovinsi lain.”. (Hasil wawancara HW, 29 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait regulator disimpulkan bahwa dalam hal menjaga kualitas garam, sangat dihimbau kepada

para pengepul yang ada di Kabupaten Jeneponto tersebut tidak diperkenankan mengambil produksi garam dari daerah lain. Dan harus mementingkan hasil produksi garam didaerahnya sendiri.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang mengatakn bahwa:

“Terkait dengan regulasi atau aturan tentang menjaga stabilitas harga garam , sangat memang diperlukan aturan seperti ini mengapa demikian, hal ini sangat menguntungkan bagi para petani karena para pengepul tersebut lebih memfokuskan mengambil garam didaerahnya sendiri hal ini disebabkan produksi garam yang sangat melimpah ”.(Hasil wawancara IB, 03 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait regulator disimpulkan bahwa dengan nenerapkan beberapa aturan, hal ini sangat menguntungkan bagi para petani garam dalam hal ekspor garam karena ada juga beberapa poin penting yang menjadi nilai tambah bagi para petani garam.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk aturan dek, memang sudah diberlakukan dari beberapa tahun yang lalu dan masih berlaku sampai sekarang. Demikian juga adanya aturan yang mengatur mengenai stabilitas harga garam. Jadi ini merupakan poin yang sangat menguntungkan para petani garam sehingga harganya sesuai dengan harga yang ada dipasaran dan tidak terjadi manipulasi harga.”(Hasil wawancara AJ, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait regulator dapat disimpulkan bahwa aturan aturan yang mengacu tentang stabilita harga garam masih berlaku sampai sekarang yang dimana aturan ini merupakan poin yang sangat penting bagi para petani untuk meningkatkan kualitas produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa :

“Terkait dengan regulator atau aturan tentang stabilitas harga garam. Kami para petani ini sangat senang karena, dengan aturan ini para pengepul garam juga tidak mengambil garam dari luar Kabupaten Jeneponto untuk di ekspor ke daerah – daerah lain akan tetapi lebih mementingkan produksi garam yang ada di 4 kecamatan di Jeneponto ini”. (Hasil wawancara DS, 3 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan regulator dapat disimpulkan bahwa para petani sangat terbantu dengan adanya aturan mengenai stabilitas harga garam . Dengan adanya aturan ini tidak memberikan ruang gerak bagi para pengepul garam yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala yang mengatakan bahwa:

“Aturan ini sudah diberlakukan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, guna untuk memberikan ruang bagi kami para petani sehingga kualitas produksi garam di Kecamatan Bangkala ini terus meningkat dan bisa nilai ekspor garam ini dapat meningkat tiap tahunnya dan kami harapkan tahun ini ekspor garam kami akan melebihi hasil ekspor dari tahun tahun sebelumnya”.(Hasil wawancara DN, 03 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait regulator disimpulkan bahwa dengan diterapkannya beberapa aturan dari tahun lalu dan masih berlaku sampai sekarang, sangat berguna bagi para petani dalam meningkatkan produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Berlakunya aturan ini tidak bisa memberikan ruang gerak bagi para oknum yang lainnya yang bisa merusak atau menurunkan harga garam yang ada di

Jeneponto ini. Dengan meningkatkan kualitas produksi dapat pula meningkatkan stabilitas harga garam para petani sehingga pendapatan para petani mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.”(Hasil wawancara AR, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait regulator dapat disimpulkan bahwa dengan diberlakukannya aturan tersebut, tidak lagi memberikan ruang gerak bagi para oknum-oknum yang ingin merusak harga garam yang ada di Kabupaten Jeneponto. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang bisa menurunkan angka produksi apabila ada oknum yang memainkan harga tersebut.

Selanjutnya terkait dengan regulator jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa dengan adanya beberapa aturan yang mencakup dengan stabilitas harga garam di Kabupaten Jeneponto. Pemerintah dengan masyarakat ini sangat terbantu karena tidak ada lagi oknum yang bisa memanipulasi harga garam yang ada di Kabupaten Jeneponto. Aturan ini sudah berlaku dari beberapa tahun yang lalu dan masih berlaku sampai sekarang. Regulasi ini memberikan ruang gerak bagi para petani karena tidak ada lagi pengepul garam yang mengambil garam dari luar untuk di jual kembali.

2. Dinamisator

Penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas harga garam di Kabupaten Jeneponto diantaranya dengan memberikan: Pengarahan, Bimbingan dan Penggerak. Dalam hal ini perannya sangat penting guna untuk memberikan beberapa pengetahuan tambahan bagi para petani garam yang ada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait dinamisor dengan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikana Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat khususnya bagi para petani garam juga sangat diperlukan dalam hal meningkatkan produksi garam salah satunya yaitu dengan bimbingan. Dengan bimbingan adanya bimbingan ini, Kami harapkan para petani garam dapat meningkatkan kualitas produksi serta dapat pula meningkatkan hasil ekspor garam ke beberapa daerah daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan”.(Hasil wawancara IB, 03 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dinamisor disimpulkan bahwa salah yang menjadi daya dukung dalam hal meningkatkan produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto tersebut adalah partisipasi masyarakat. Dengan ini dapat menghasilkan kualitas produksi garam yang meningkat serta dapat memenuhi kebutuhan ekspor garam di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait dinamisor dengan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa arahan- arahan yang kami berikan kepada para petani garam dalam hal meningkatkan produksi saya rasa sudah berhasil dan terlaksana dengan baik. Buktinya beberapa tahun ini hasil ekspor garam ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan sangat meningkat. Hal ini dikarenakan kualitas garam yang diproduksi disini lebih bagus dari sebelumnya”.(Hasil wawancara AJ, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dinamisor dapat disimpulkan bahwa hasil ekspor garam di wilayah Sulawesi Selatan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi nilai tambah bagi para petani garam karena kualitas garam yang diproduksi sekarang sudah sangat bagus jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara terkait Dinamisator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa :

“Terkait peran kami selaku petani garam yang menjaga harga garam agar tetap stabil, Misalnya dalam hal pengelolaan garam yang baik salah satunya dengan teknik Bio Membran yang mungkin cara pengelolaannya yang cukup sederhana menurut kami. Nah, kalau aturan dari pemerintah yang khususnya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto memang sudah diterapkan dari beberapa tahun yang lalu dan ,masih berlaku sampai sekarang dan dampaknya begitu besar bagi kami para petani garam,” (Hasil wawancara DS,03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait dinamisator dapat disimpulkan bahwa pengolahan dengan teknologi Bio Membran merupakan cara pengolahan garam yang cukup sederhana. Dengan teknologi ini mampu menghasilkan butir garam yang lebih besar dan berkristal dan bening. Dengan teknologi tersebut sangat mampu mendongkrak hasil produksi serta mampu meningkatkan nilai jual.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait Dinamisator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini pemerintah tetap berperan penting juga dalam hal menjaga harga garam di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dikarenakan pemerintah ingin terus mengembangkan produksi garam ini agar menjadi salah satu pengekspor garam yang terbesar juga dan diharapkan juga mampu bersaing dari segi kualitas garamnya”. (Hasil wawancara DN, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait regulator disimpulkan bahwa peran penting pemerintah Kabupaten Jeneponto sangat jelas dalam hal menjaga harga garam agar tetap sesuai dengan harga yang ada dipasaran. Hal tersebut dikarenakan Jeneponto merupakan salah satu pengekspor terbesar yang

ada di Sulawesi Selatan dan diharapkan mampu bersaing dengan produksi garam di beberapa wilayah lain yang ada diluar Sulawesi.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa :

“Kalau bimbingan yang diberikan kepada kami para petani garam itu sudah ada. Salah satu bimbingan atau pelatihannya ini berguna bagi kami karena teknologi ini membantu menghasilkan garam yang kualitasnya baik jika dibandingkan dengan menggunakan cara-cara yang lama yang tidak mampu bersaing dipasaran”. (Hasil wawancara AR, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan dinamisiator dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan dari bimbingan yang diberikan kepada petani garam tidak lain hanya untuk meningkatkan kualitas garam yang mereka produksi.

Selanjutnya terkait dengan dinamisiator jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan hasil produksi petani garam yang ada di Kabupaten Jeneponto. Dinas Kelautan dan Perikanan ini sangat berperan penting dalam menjaga kualitas garam. Bimbingan dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang baru tentang bagaimana cara menghasilkan garam dengan kualitas yang baik serta dapat bersaing di pasaran. Dengan menggunakan beberapa teknologi yang sederhana, diharapkan produksi garam yang ada di kabupaten Jeneponto ini meningkat dari beberapa tahun sebelumnya. Bimbingan atau penyuluhan ini juga mampu memberikan dampak yang begitu besar terhadap perkembangan usaha garam yang ada di Kabupaten Jeneponto tersebut.

3. Fasilitator

Penyedia sumberdaya dan pelatihan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat menjaga stabilitas harga garam yang ada di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto Sebagai fasilitator ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: Pengembangan produksi dan pendanaan atau permodalan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait fasilitator dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jeneponto yang mengatakan :

“Dengan adanya pelatihan bagi para petani garam, hal ini sangat membantu seperti PUGAR (Pemberdayaan Usahan Garam Rakyat) serta kami juga memberikan sosialisasi mengenai penerapan sistem Bio Membran. Sistem Bio Membran yaitu cara pengelolaan garam dari cara yang tradisional ke modern yang menggunakan bahan yang sederhana yaitu berua plasti hitam sehingga dapat menghasilkan Kristal Kristal garam yang bening dan besar.” (Hasil wawancara AS, 29 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas bahwa terkait fasilitator dapat disimpulkan bahwa program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) merupakan salah satu program yang sangat membantu meningkatkan hasil penjualan petani garam yang ada di Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait fasilitator dengan Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa :

“Kalau masalah pendanaan tidak, akan tetapi kami hanya membantu dari segi sarana dan prasarana saja salah satunya penyuluhan kepada para petani garam sehingga menghasilkan produksi yang bagus dan stabilitas harga akan meningkat lagi . Kalau hasil produksi kecil, itu tidak masuk akal dan akan mengakibatkan harganya semakin turun”. (Hasil wawancara HW, 29 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait fasilitator disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada para petani garam ini hanya berupa penyuluhan serta beberapa pelatihan yang diharapkan mampu menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait fasilitator dengan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah pendanaan atau memberikan modal, Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto tidak memberikan modal kepada para petani, akan tetapi kami mempunyai cara yaitu dengan pengembangan produksi. Pengembangan produksi ini sangat memberikan dampak yang begitu besar terhadap petani garam demi meningkatkan kualitas garam yang baik dari sebelumnya” (Hasil wawancara IB, 03 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait fasilitator disimpulkan bahwa pengembangan produksi merupakan cara yang ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto dalam hal meningkatkan hasil produksi para petani garam yang di Kabupaten Jeneponto tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait fasilitator dengan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Kami juga memfasilitasi petani garam yang ada di Jeneponto berupa kendaraan roda 3 yang bergua mengangkut garam supaya lebih efektif. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk penyedia sarana dan prasarana terhadap peningkatan hasil produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto ini. Dengan ini kami harapkan para petani tidak susah payah mengangkut produksi garamnya untuk dibawah ke gudang. Karena kami sudah menyediakan beberapa kendaraan untuk mengangkut hasil produksi tersebut” (Hasil wawancara AJ, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait fasilitator dapat disimpulkan bahwa dengan diberikannya kendaraan untuk mengangkut hasil produksi garam para petani yang ada di Kabupaten Jeneponto ini membuat para petani di sini tidak kerepotan untuk membawa hasil produksi garam mereka ke gudang penyimpanan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait fasilitator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa :

“Kalau sarana penunjang dalam hal menjaga stabilitas harga garam yang ada di Jeneponto, Pemerintah yang khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan beberapa pelatihan seperti PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat). Program ini dari pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan dari program ini kami harapkan dapat membantu para petani untuk meningkatkan produktivitas garam yang ada di Kabupaten Jeneponto agar stabilitas harganya tetap terjaga”. (Hasil wawancara DS, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan fasilitator dapat disimpulkan bahwa sarana penunjang terhadap petani di Kabupaten Jeneponto ini berupa program PUGAR (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) yang sangat membantu dalam hal meningkatkan produksi.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala yang mengatakan bahwa:

“Pelatihan yang kami dapat yaitu tentang bagaimana penerapan teknologi Bio Membran. Penerapan ini menggunakan cara yang tradisional kemandirian yang hanya menggunakan plastik hitam guna mendapatkan kualitas garam yang terbaik . Kualitas garam ini merupakan kualitas yang paling bagus dan mampu bersaing dipasaran”.(Hasil wawancara DN, 03 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait fasilitator disimpulkan bahwa produksi garam dengan cara yang lebih modern diharapkan

mampu menjaga kualitas garam agar tetap baik dan bagus. Cara ini juga memberikan nilai tambah dalam hal produksi yang jika dibandingkan dengan menggunakan cara yang sangat tradisional.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara terkait regulator dengan Petani Garam di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yang mengatakan bahwa:

“Salah satu sarana dan prasarana yang diberikan kepada kami para petani garam untuk meningkatkan hasil produksi garam kami yaitu beberapa kendaraan roda 3 pengangkut garam yang dapat memudahkan pengangkutan garam ke lokasi pengepul dan ada juga alat uji mutu garam yang baik yang portable maupun berupa alat laboratorium sederhana (titrasi). Alat – alat ini mampu mengetahui kualitas garam yang kami produksi sehingga harga pasarannya tetap stabil” (Hasil wawancara AR, 03 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas terkait fasilitator dapat disimpulkan bahwa adapun berupa alat uji coba mutu garam yang baik menggunakan alat yang bernama titrasi. Alat ini mampu mengetahui kualitas garam yang diproduksi oleh para petani di Kabupaten Jeneponto.

Selanjutnya terkait dengan fasilitator jika dikaitkan dengan hasil observasi selama di lapangan dapat diketahui bahwa beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah yang khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah kendaraan roda 3 yang sangat berguna untuk mengangkut garam ke gudang penyimpanan. Pemerintah juga memfasilitasi petani garam dengan teknologi Bio Membran yang cara penggunaannya sangat sederhana yang hanya berbahan plastic hitam. Ada juga berupa program pugar yang dimana program ini merupakan program yang berasal dari pusat dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan.

Program ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas harga garam yang ada di Kabupaten Jeneponto.

E. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto mengenai stabilitas harga garam jika dikaitkan dengan tiga indikator yaitu: Regulator, Dinamisator dan Fasilitator, maka berdasarkan observasi selama meneliti dalam hal menjaga stabilitas harga garam disana, pemerintah Kabupaten Jeneponto memberlakukan sebuah regulasi. Regulasi atau aturan ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1/ KEP-DJPRL/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2020. Yang dimana program PUGAR ini merupakan acuan bagi penanggungjawab, pelaksana program dan memangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan usaha garam rakyat di Provinsi dan Kabupaten agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Serta dalam hal dinamisator yang sesuai dengan hasil observasi selama di lapangan jika dikaitkan teori tersebut, pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama beberapa lapisan masyarakat yang khususnya para petani garam yang tersebar di empat kecamatan tersebut melakukan beberapa rangkaian usaha demi meningkatkan stabilitas harga garam agar para petani di empat kecamatan tersebut dapat memproduksi garam yang mempunyai kualitas yang baik yang sesuai dengan harga.

Adapun beberapa fasilitas yang telah diberikan kepada para petani garam yang ada di empat Kecamatan tersebut salah satu diantaranya dengan beberapa kendaraan pengangkut garam yang sangat berperan penting demi mempermudah pengangkutan garam yang sudah diproduksi dibawa ke gudang penyimpanan yang selanjutnya akan di ekspor ke beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Ada juga yang biasa disebut dengan Bio Membran yang dimana alat ini mampu menghasilkan garam yang mempunyai kualitas yang sangat baik jika dibandingkan dengan menggunakan teknologi yang sangat tradisional.

Tabel 4.4 Data perkembangan data peningkatan petani garam yang ada di 4 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto dari tahun 2019 - 2020 :

No	Nama Kecamatan	2019	2020
1	Bangkala Barat	55 Orang	55 Oarng
2	Bangkala	80 Orang	50 Orang
3	Tamalatea	70 Orang	90 Orang
4	Arungkeke	120 Orang	100 Orang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Jeneponto 2019

Berdasarkan data yang diperoleh diatas mengenai peningkatan petani garam yang ada di empat Kecamatan di Kabupaten Jeneponto ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tamalatea mengalami peningkatan petani garam sebanyak 20 orang. Hal ini memungkinkan adanya keberhasilan dalam hal menjaga kualitas produksi

yang ada di Kecamatan Tamalatea. Akan tetapi sangat berdeda dengan adanya dua Kecamatan yang mengalami pengurangan petani garam yaitu Kecamatan Bangkala serta Kecamatan Arungkeke. Kedua kecamatan ini mengalami pengurangan petani garam karena disebabkan beberapa hal salah satunya pandemi selama tahun 2020 yang mengakibatkan produksi tidak terlalu lancer jika dibandingkan dengan Kecamatan Tamalatea. Berbeda dengan Kecamatan Barat yang dimana tidak mengalami peningkatan petani garam yang terdata pada Dinas Kelautan dan Perikanan tetap 55 orang dari tahun 2019 – 2020. Akan tetapi jika dilihat dari segi ekspor garam dari 4 Kecamatan tersebut selama tahun 2020 tidak mengalami penurunan, akan tetapi mengalami sedikit peningkatan serta pemasarannya tetap stabil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah saya laksanakan di Kabupaten Jeneponto dengan judul Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yaitu :

a. Regulator

Berlakunya aturan-aturan tentang stabilitas harga garam yang di Kabupaten Jeneponto sangat menguntungkan para petani garam di sini. Hal ini merupakan wilayah Jeneponto sudah termasuk ke dalam stok nasional pengeksport garam yang tersebar di empat kecamatan yaitu : Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, dan Arungkeke. bahwa dengan adanya beberapa aturan yang mencakup dengan stabilitas harga garam di Kabupaten Jeneponto. Pemerintah dengan masyarakat ini sangat terbantu karena tidak ada lagi oknum yang bisa memanipulasi harga garam yang ada di Kabupaten Jeneponto. Aturan ini sudah berlaku dari beberapa tahun yang lalu dan masih berlaku sampai sekarang. Regulasi ini memberikan ruang gerak bagi para petani karena tidak ada lagi pengepul garam yang mengambil garam dari luar untuk di jual kembali.

b. Dinamisator

Dalam hal pengelolaan garam yang baik pemerintah Kabupaten Jeneponto mengadakan bimbingan kepada para petani dengan menggunakan metode Bio Membran, Metode ini yaitu cara pengelolaan garam yang menggunakan

plastik hitam untuk menghasilkan butiran garam yang besar dan mampu bersaing dengan produksi garam di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi tersebut. Untuk meningkatkan hasil produksi petani garam yang ada di Kabupaten Jeneponto. Dinas Kelautan dan Perikanan ini sangat berperan penting dalam menjaga kualitas garam. Bimbingan dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang baru tentang bagaimana cara menghasilkan garam dengan kualitas yang baik serta dapat bersaing di pasaran. Dengan menggunakan beberapa teknologi yang sederhana, diharapkan produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto ini meningkat dari beberapa tahun sebelumnya. Bimbingan atau penyuluhan ini juga mampu memberikan dampak yang begitu besar terhadap perkembangan usaha garam yang ada di Kabupaten Jeneponto tersebut.

c. Fasilitator

Adapun beberapa fasilitas yang diberikan kepada para petani garam yang ada di Kabupaten Jeneponto ini salah satunya adalah kendaraan roda 3 yang digunakan untuk mengangkut hasil garam agar mudah dibawa ke gudang penyimpanan. Ada juga berupa alat laboratorium yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas garam yang baik. Beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah yang khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah kendaraan roda 3 yang sangat berguna untuk mengangkut garam ke gudang penyimpanan. Pemerintah juga memfasilitasi petani garam dengan teknologi Bio Membran yang cara penggunaannya sangat sederhana yang hanya berbahan plastik hitam. Ada juga berupa program pugar yang dimana program ini merupakan program yang berasal dari pusat dalam hal ini

kementrian kelautan dan perikanan. Program ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas harga garam yang ada di Kabupaten Jeneponto.

B. Saran

Adapun beberapa saran berdasarkan penelitian yang sudah saya laksanakan di Kabupaten Jeneponto dengan judul Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto yaitu:

- a. Kami harapkan pengembangan produksi garam yang ada di Kabupaten Jeneponto lebih ditngkatkan lagi agar tahun yang akan datang akan menjadi pengekspor garam yang terbesar diwilayah Sulawesi.
- b. Bimbingan kepada para petani garam yang ada di Kabupaten Jeneponto perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan beberap inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, 2009, Biddle dan Thomas: Menelaah Peran dalam Perilaku Sosial, Arginamis, Yogyakarta
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES
- Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta : Kencana. 2013
- Elder, Glen, Jr. 2010. Hand Book of The Life Course Chapter 1: The Emergence and Development of Lif Course Theory. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 2010. Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halidasari Armaya*. 2018. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Produksi Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Huda Nailul*. 2018. Analisis Industri Garam Lokal di Kabupaten Rembang
- Komaruddin. 2009. Ensiklopedia Manajemen, edisi keenam, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. London: Cambridge University Press
- Muluk, Khairul. 2009. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumedia Publishing
- M. Sitanggang dan B. Sarwono. 2011. Jakarta :Penebar Swadaya.
- McEachem, William . 2010. Pendekatan Kontemporer . Jakarta: Salemba Empat
- Ndraha, Taliziduhu.2011. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Rivai, Veithzal. 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2009, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, EdisiBaru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004,Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.

Syakir Imdad Mohammad. 2019. Pengaruh Produktivitas dan Harga Jual Produksi Garam Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Pati

Thoah, Miftah. 2009. Perilaku organisasi. Bandung : PT Raja Grafindo Persada.

W.J.S.Poerwadarminta, 2010. Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka.

Yusuf.2011. Sosiologi Konsep dan Teori. Bandung: PT. Refika.

Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh. 2018. Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Studi kasus di dinas perindag DIY

Internet

<https://makassar.terkini.id/produksi-garam-jenepono-semakin-merosot/>

Undang- Undang

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1/ KEP- DJPRL/2020

Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2020



L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN



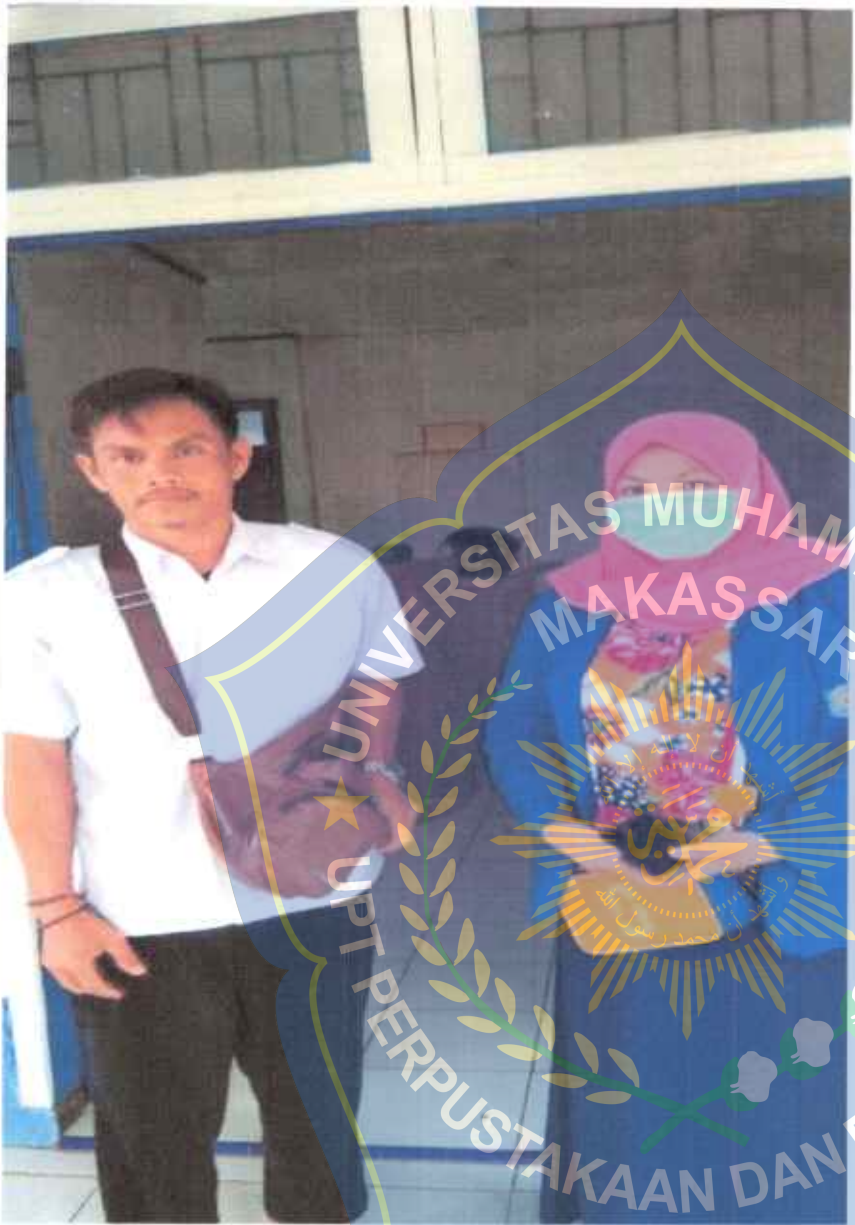
Ket : Wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto



Ket : Wawancara dengan Sekertaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Jeneponto







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

RIWAYAT HIDUP



RAHMAWATI SETI AKBARI JUNAEDI Lahir pada tanggal 04 Februari 1995 di Kalumpang. Anak Keuda dari 6 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Junaedi dan Rosmawati. Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SD Inpres Tete Batu I dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Askari Pallangga dan tamat pada tahun 2008.

Setelah tamat, penulis kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2012. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2013 penulis berhasil lulus di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1). Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menimba ilmu yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dan di tahun 2020 penulis melakukan penelitian dengan judul "**Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Garam Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepontaga**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)